PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alpius Sarumaha
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 08 Januari 2026

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat

Alpius Sarumaha
NIP 196702112005021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,88 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	**Rp 13.870.671.000,-**
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 13.870.671.000,-

Jakarta, 08 Januari 2026

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat

Alpius Sarumaha
NIP 196702112005021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alpius Sarumaha
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 08 Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat

Alpius Sarumaha
NIP 196702112005021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alpius Sarumaha
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 08 Januari 2026

Pihak Kedua, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat
Min Usihen NIP 196903091994032001	Alpius Sarumaha NIP 196702112005021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%
2.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%
3.	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	11%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	**Rp 23.454.000,-**
Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	Rp 23.454.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	**Rp 1.123.000.000,-**
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 1.123.000.000,-

Jakarta, 08 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen
NIP 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat

Alpius Sarumaha
NIP 196702112005021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alpius Sarumaha
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 08 Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat

Alpius Sarumaha
NIP 196702112005021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alpius Sarumaha
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 08 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Andry Indrady
NIP 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat

Alpius Sarumaha
NIP 196702112005021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95,5 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	**Rp 68.598.000,-**
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp **68.598.000**,-

Jakarta, 08 Janauri 2026

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Andry Indrady
NIP 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat

Alpius Sarumaha
NIP 196702112005021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alpius Sarumaha
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 08 Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat

Alpius Sarumaha
NIP 196702112005021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alpius Sarumaha
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 08 Januari 2026

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat
Widodo	Alpius Sarumaha NIP. 196702112005021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,2%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	**Rp 2.104.343.000,-**
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp 2.104.343.000,-

Jakarta, 08 Januari 2026

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat

Alpius Sarumaha
NIP. 196702112005021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alpius Sarumaha
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 08 Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat

Alpius Sarumaha
NIP. 196702112005021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATER BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alpius Sarumaha
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Hermansyah Siregar
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Januari 2026

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat
Hermansyah Siregar	Alpius Sarumaha
NIP 197010161992031001	NIP 196702112005021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%
2.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%
3.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,50 Level

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	**Rp 2.263.394.000,-**
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.263.394.000,-

Jakarta, 8 Januari 2026

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Hermansyah Siregar
NIP 197010161992031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat

Alpius Sarumaha
NIP 196702112005021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alpius Sarumaha
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 8 Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat

Alpius Sarumaha
NIP 196702112005021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alpius Sarumaha
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 08 Januari 2026

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat
Dhahana Putra NIP 196909091993031001	Alpius Sarumaha NIP 196702112005021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA BARAT DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	**Rp 266.400.000,-**
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 266.400.000,-

Jakarta, 08 Januari 2026

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Sumatera Barat

Alpius Sarumaha
NIP 196702112005021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alpius Sarumaha
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 08 Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah
Sumatera Barat

Alpius Sarumaha
NIP 196702112005021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Funna Maulia Massaile
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Alpius Sarumaha
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 21 Januari 2026

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat	Pihak Pertama, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Sumatera Barat
Alpius Sarumaha NIP. 196702112005021001	Funna Maulia Massaile NIP. 197603122005012001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Wilayah	1. Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum sesuai dengan permohonan	1 Laporan
		2. Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang selesai diharmonisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	100%
2.	Tersusunnya Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah	Jumlah rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah di wilayah	1 Rekomendasi (10 Perda)
3.	Terlaksananya Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	1. Jumlah pemberian layanan Bantuan Hukum Litigasi	128 Orang
		2. Jumlah pemberian layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	16 Kelompok Masyarakat
4.	Terlaksananya pembinaan pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum di wilayah	Jumlah Anggota JDIH yang dibina di Wilayah Kerja Kantor Wilayah	10 Lembaga
5.	Terlaksananya pembinaan dan/atau pendampingan pos bantuan hukum di wilayah	Jumlah pos bantuan hukum yang dibina dan/atau didampingi	100 Lembaga
6.	Tersedianya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Jumlah Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang diselesaikan	2 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	**Rp 266.400.000,-**
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 239.779.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 26.621.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	**Rp 1.123.000.000,-**
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 1.123.000.000,-
Program Dukungan Manajemen	**Rp 68.598.000,-**
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 68.598.000,-

Padang, 21 Januari 2026

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat	Pihak Pertama, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Sumatera Barat
Alpius Sarumaha	Funna Maulia Massaile
NIP. 196702112005021001	NIP. 197603122005012001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Funna Maulia Massaile
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, 21 Januari 2026

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Kantor Wilayah Sumatera Barat



Funna Maulia Massaile
NIP. 197603122005012001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lista Widyastuti
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Alpius Sarumaha
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 21 Januari 2026

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat	Pihak Pertama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Sumatera Barat
Alpius Sarumaha NIP. 196702112005021001	Lista Widyastuti NIP. 197310092000032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya sosialisasi dan diseminasi layanan AHU di Wilayah	Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi dan diseminasi layanan AHU di Wilayah	150 Orang
2.	Ditindaklanjutinya laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris ke Majelis Pengawas Daerah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris yang ditindaklanjuti pada tingkat Majelis Pengawas Daerah	98,2%
3.	Terlaksananya Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Jumlah permohonan KI di wilayah	5540
4.	Terlaksananya tindak lanjut penanganan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah	Persentase aduan pelanggaran hak kekayaan intelektual dan sengketa hak kekayaan intelektual di wilayah yang ditindak lanjuti	100%
5.	Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah	1. Jumlah kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual yang dilaksanakan di wilayah	1 Kegiatan
		2. Persentase penyusunan kerja sama kekayaan intelektual di wilayah	30%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	**Rp 4.367.737.000,-**
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 2.104.343.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.263.394.000,-

Padang, 21 Januari 2026

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat	Pihak Pertama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Sumatera Barat
	
Alpius Sarumaha	Lista Widyastuti
NIP. 196702112005021001	NIP. 197310092000032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lista Widyastuti
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, 21 Januari 2026

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Kantor Wilayah Sumatera Barat

Lista Widyastuti
NIP. 197310092000032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bobby Sectio Wahyudi
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Alpius Sarumaha
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 21 Januari 2026

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat	Pihak Pertama, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Sumatera Barat
Alpius Sarumaha NIP. 196702112005021001	Bobby Sectio Wahyudi NIP. 197906192006041001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Diselesaikannya laporan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait Kantor Wilayah	Jumlah laporan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait Kantor Wilayah	**1 Laporan**
2.	Terwujudnya layanan dukungan manajemen di Kantor Wilayah	Jumlah layanan dukungan manajemen di Kantor Wilayah	**1 Layanan**

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	**Rp 13.870.671.000,-**
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 13.870.671.000,-

Padang, 21 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat

Alpius Sarumaha
NIP. 196702112005021001

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Kantor Wilayah Sumatera Barat

Bobby Sectio Wahyudi
NIP. 197906192006041001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bobby Sectio Wahyudi
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, 21 Januari 2026

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Kantor Wilayah Sumatera Barat



Bobby Sectio Wahyudi
NIP. 197906192006041001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febriandi
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Lista Widyastuti
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 21 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
Kantor Wilayah Sumatera Barat	Kantor Wilayah Sumatera Barat
Lista Widyastuti	Febriandi
NIP. 197310092000032001	NIP. 197002101992031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DENGAN KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya survei Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Jumlah masyarakat yang mengisi survei Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	150 Orang
2.	Diselesaikannya laporan Pelaksanaan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	1 Laporan

Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	**Rp 2.104.343.000,-**
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 2.104.343.000,-

Padang, 21 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Kantor Wilayah Sumatera Barat

Lista Widyastuti
NIP. 197310092000032001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
Kantor Wilayah Sumatera Barat

Febriandi
NIP. 197002101992031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febriandi
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, 21 Januari 2026

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
Kantor Wilayah Sumatera Barat

Febriandi
NIP. 197002101992031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faisal Rahman
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Lista Widyastuti
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 21 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Kantor Wilayah Sumatera Barat	Kantor Wilayah Sumatera Barat
Lista Widyastuti	Faisal Rahman
NIP. 197310092000032001	NIP. 197707052002121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah.	1. Terlaksananya edukasi/ diseminasi pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dan pendampingan pengajuan permohonan layanan kekayaan intelektual di wilayah.	1 Laporan
		2. Terlaksananya survei kepuasan masyarakat atas layanan KI.	1 Laporan
		3. Terlaksananya inventarisasi SOP layanan KI di wilayah dan mengikuti bimbingan atau pendampingan aplikasi dashboard monitoring Kantor Wilayah sebagai dukungan atas hasil pelaksanaan kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah terhadap standar pelayanan.	1 Laporan
2.	Terlaksananya tindak lanjut penanganan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah.	1. Laporan hasil koordinasi penanganan aduan/ pelanggaran/ penyelesaian sengketa KI dengan melibatkan APH apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang signifikan.	1 Laporan
		2. Laporan kegiatan penanganan aduan pelanggaran KI.	1 Laporan
		3. Laporan capaian penyekesaian aduan pelanggaran KI dan sengketa pelanggaran KI.	1 Laporan
3.	Peningkatan maturitas pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah	1. Terselesaikannya laporan monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi.	1 Laporan
		2. Terselesaikannya laporan finalisasi skor maturitas wilayah dan penyampaian laporan resmi ke pusat.	1 Laporan
		3. Terselesaikannya evaluasi maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah.	1 Laporan

Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	**Rp 2.263.394.000,-**
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.263.394.000,-

Padang, 21 Januari 2026

Pihak Kedua, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Sumatera Barat	Pihak Pertama, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Sumatera Barat
Lista Widyastuti	Faisal Rahman
NIP. 197310092000032001	NIP. 197707052002121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faisal Rahman
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, 21 Januari 2026

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Kantor Wilayah Sumatera Barat

Faisal Rahman
NIP. 197707052002121001